

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK
JALANAN DI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

OLEH :

DEDEK NOVALINA

148520055



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/22

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR SEKRIPSUTESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : DEDEK NOVALINA
NPM : 14.8520.055
Program Studi : Adminitrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul:

Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data/database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi/ tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2018

Yang menyatakan



DEDEK NOVALINA

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan yang didapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, Semptember 2018

Penulis,



DEDEK NOVALINA

NPM.148520055



ABSTRAK
PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI
KABUPATEN LANGKAT

DEDEK NOVALINA
148520055

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis program kerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Langkat dan untuk menganalisis factor-faktor yang menghambat program kerja Dinas Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan atau dicapai, dan factor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilaksanakan Dinas Sosial dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap informan atau responden yang bisa memberi informasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan anak jalanan terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi. Walaupun sudah dilaksanakan, tetapi masih ada anak jalanan turun kejalan lagi. Oleh karena itu perlu upaya kerjasamanya dari pemerintah, baik dari pemerintah satu dengan yang lain dan kerjasama dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta aparaturnya yang bersangkutan tentang pembinaan anak jalanan.

Kata kunci : Dinas Sosial, Pembinaan Anak Jalanan

ABSTRACT
THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN THE GUIDANCE OF STREET
CHILDREN IN LANGKAT DISTRICT

DEDEK NOVALINA
148520055

The purpose of this research was to analyze the work program of the Office of Social Affairs in the Implementation of Protection and Development of Street Children in Langkat District and to analyze the factors that hampered the Social Service work program. The problem in this study is whether the implementation of street children protection and coaching programs conducted by the Langkat District Social Service is in accordance with the desired or achieved results, and the factors that hinder the Social Service in protecting and fostering street children in Langkat District. This research was carried out by the Office of Social Affairs and the type of research used was a qualitative type, namely by conducting interviews with informants or respondents who could provide good information.

Based on the results of this study it can be concluded that the street child development system is carried out in accordance with the tasks and functions. Even though it has been implemented, there are still street children going down the street again. Therefore, it is necessary to collaborate with the government, both from the government and one another and cooperation with the community, non-governmental organizations, and other apparatuses concerned about the development of street children.

Keywords: Social Service, Street Child Development

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Peranan	5
2.2 Pembinaan	9
2.2.1. Bentuk Pembinaan	11
2.2.2. Pembinaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial	11
2.2.3. Tujuan Pembinaan	17
2.2.4. Rehabilitasi sosial	18
2.3 Anak Jalanan	19
2.3.1. Latar Belakang Munculnya Anak Jalanan	21
2.3.2. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan	21
2.3.3. Karakteristik Anak Jalanan	29
2.3.4. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan	32
2.3.5. Isu Prioritas	32
2.4 Dinas Sosial	34
2.5 Penelitian yang relevan	35
2.6 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3 Informan Penelitian	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisa Data	39
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1. Gambar Umum	41
4.1.2. Visi dan Misi	42
4.1.3. Sumber Daya Manusia	43
4.1.4. Rencana Pogram	44
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi	44
4.1.6. Penghargaan/Prestasi yang dicapai OPD selama Tahun 2017	52
4.1.6. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Langkat	53
4.2 Pembahasan	54

4.2.1. Pembinaan Anak Jalanan Kabupaten Langkat	54
4.2.2. Hambatan-hambatan yang dialami Dinas Sosial Kabupaten Langkat	63
BAB V Kesimpulan Dan Saran	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang begitu berat. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Langkat.”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Ketua program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Indra Muda Hutasuhut, MAP selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Irwan Nasution S.Pd, MAP selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.Sc selaku Sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua Orangtua yang sangat peneliti cintai, yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini.
7. Bapak Rismawadi S.Sos selaku Subag Umum Kepegawaian dan Informasi Data Dinas Sosial Kabupaten Langkat, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
8. Para Informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Semua Mahasiswa/i kelas malam Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area stambuk 2014 yang telah banyak membantu dan memberi masukan pada skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Medan, September 2018

Penulis,

DEDEK NOVALINA
14.852.0055

LAMPIRAN



Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala seksi rehabilitasi sosial



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak jalanan adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan. Usia mereka relatif masih sangat muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan semestinya. Beberapa anak jalanan di sekitaran Kabupaten Langkat menggantungkan hidupnya menjadi pengemis yang mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang ia jumpai dikeramaian.

Anak jalanan merupakan anak yang sering mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Pada umumnya anak-anak rentan terhadap perlakuan yang tidak menyenangkan oleh orang dewasa. Oleh karenanya harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh pada badan pusat statistik Sumatera Utara bahwa jumlah anak jalanan di Kabupaten Langkat saat ini kembali meningkat, padahal tiga tahun terakhir sudah ada penurunan secara berkelanjutan, jumlah anak jalanan pada Desember 2014 adalah 2,53%, kembali menurun pada April 2015 menjadi 0,53% bahkan pada Mei 2015 juga menurun menjadi 0,08%, namun pada Juni 2016 menjadi kembali meningkat menjadi 0,42% dan pada agustus 2017 kembali meningkat menjadi 1,06% (BPS SUMUT September 2017). Ini dikarenakan faktor-faktor lingkungan dimasyarakat yang disebabkan perceraian dan ekonomi yang tidak stabil di Kabupaten Langkat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat dengan melakukan bentuk upaya pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi sosial, dan pengawasan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut.

Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Langkat mengalami masalah serius yaitu bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mengalami kasus yang sulit untuk dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat sendiri. Hal ini bukan karena tidak memiliki alasan, mereka memilih untuk hidup di jalanan daripada di bawa ke tempat pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten, sebab menurut anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sendiri mereka lebih senang untuk hidup di jalanan karena mendapatkan belas kasihan dari orang-orang dan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, maka dengan alasan tersebut mereka menolak dan sulit untuk dibina ke panti atau tempat rehabilitasi milik pemerintah.

Dengan melihat permasalahan tersebut maka peranan Dinas Sosial Kabupaten Langkat perlu ditingkatkan lagi dalam upaya mengurangi permasalahan anak jalanan ini, penanganan bukan hanya sekedar melakukan razia terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis saja, melainkan perlu dilakukan semacam bentuk pembinaan yang memiliki dampak besar bagi anak jalan tersebut sehingga tidak berkeinginan untuk kembali kejalanan.

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik memilih judul dalam penulisan ini yaitu : **“Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Langkat ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam membina anak jalanan di Kabupaten Langkat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Seiringan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk meneliti Bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Langkat

2. Untuk meneliti hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam membina anak jalanan.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. **Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu administrasi publik. Penggunaan konsep dan teori pengawasan dalam hubungannya dengan fenomena yang ada di masyarakat, dapat menghasilkan konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

2. **Aspek praktis**

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Sandiaja (2015 : 99 – 101) mengemukakan bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. “Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peranan, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan Sandiaja, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Horton dan Hunt dalam Wirutomo (2007: 116). Pengertian “Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status”. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Soejono Soekanto, (2007:221) dalam bukunya *Sosiologi (Suatu Pengantar)* mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”.

Soekanto, (2007: 153) Aspek-aspek peranan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori Peranan adalah “teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater”. Dalam teater, seseorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Selain itu, peranan Bruce J. Cohen dalam Soerjono Soekanto (1992:25) juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang di harapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang memuat harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, ikutin.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasiaan yang bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi Dinas Sosial dalam

masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing Dinas Sosial dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Dinas Sosial maka akan tercipta suatu hubungan yang mmunculkan nilai pelayanan antara Dinas Sosial dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial, yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan Dinas Sosial dalam masyarakat, dan juga perilaku Dinas Sosial yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu Soerjono Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut diletakan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melakanakannya;
- c. Dalam mayarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membantasi peluang-peluang tersebut.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spritualisme. Nilai materialism dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

2.2 Pembinaan

Kata pembinaan diambil dari kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu “ usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif.

Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan miftah bahwa, “ pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.

Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan

dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang di lakukan. Menurut suparlan menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin”.

Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan hanya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh sudjana yaitu: “pembinaan dapat diartikan sebagian rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya perangkat lainnya. Pembinaan adalah suatu upaya, usaha kegiatan yang terus menerus mempelajari, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar sasaran pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pola kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan keluarga masyarakat. Pembinaan adalah segala upaya pengelolaan berupa merintis, meletakkan, dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan, serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan,

mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dana yang dimiliki. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

2.2.1. Bentuk Pembinaan

Pembinaan dibagi menjadi lima bentuk atau tahapan kegiatannya. Menurut B2P3KS menyatakan bahwa, “tahap pembinaan dan bimbingan sosial yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental psikologik, bimbingan moral keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan usaha atau kerja”. Bentuk pembinaan sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan. Lebih luas Depsos menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam rehabilitasi sosial adalah “bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut.” Senada dengan hal tersebut diatas, Enni (2010: 27) menyatakan bahwa, “proses pelayanan sosial anak terlantar dimulai dengan assesment, bimbingan sosial, bimbingan mental, dan bimbingan keterampilan.” Standar pelayanan sosial sistem panti disusun Kementerian Sosial sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing panti.

2.2.2. Pembinaan anak jalanan melalui Dinas Sosial

1. Pendampingan

Proses pendampingan membutuhkan seseorang pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan. Departemen sosial mengemukakan bahwa

pendampingan adalah “pekerja sosial yang dengan keahliannya atau pekerjaannya mendahulukan tugas-tugas pendampingan dimana yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prinsip, metode dan pekerjaan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa “Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”

Peran pekerja sosial sendiri tak kalah penting untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Peran pendamping yang dikemukakan departemen sosial sebagai berikut:

1) Pembela (advocator)

Pendamping melakukan pembelaan pada korban yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada korban, mendampingi korban dalam proses hukum, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku.

2) Penghubung (mediator)

Pendamping berperan sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal, dalam rangka merujuk dan sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang di berikan RPTC.

1) Pemungkin (enabler)

Pendamping berperan dalam mengidentifikasi permasalahan korban kebutuhan dan menjaga langkah-langkah menghadapi permasalahannya.

2) Penjangkau (outreacher)

Pendamping berperan dalam melakukan penjangkauan kepada kelompok-kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan korban tindak kekerasan yang membutuhkan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial

3) Pemberi motivasi (motivator)

Pendamping berperan dalam memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada klien untuk dapat bersikap positif, pola pikir dan mengembangkan potensi sebagai upaya pemulihan korban.

Peranan pekerja sosial antara lain:

1) Peranan sebagai perantara

Yaitu menghubungkan sistem pelayanan dan memberikan informasi masalah penerima pelayanan kepada keluarga. Pekerja sosial memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dibadan panti sosial. Selain itu pekerja sosial berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut. dalam melaksanakan peranannya pekerja sosial perlu melakukan assessment kebutuhan klien atau penerima pelayanan. Adanya assessment

kebutuhan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang bagi penerima pelayanan.

2) Peranan sebagai pemungkin

Yaitu peranan pekerja sosial dalam memfasilitasi dan memberikan peluang untuk pemecahan masalah atau menyelesaikan konflik. Peranan ini berhubungan dengan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Konsep pemberdayaan memberikan peluang pada kemampuan penerima pelayanan dan pekerja sosial dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi.

3) Peranan sebagai penghubung

Yaitu peranan pekerja sosial dalam membantu mengklarifikasikan posisi kedua belah pihak yang bertentangan dan mencariakan solusi penyelesaian dari masalah dihadapi. Peranan yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih serta menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan klien atau penerima pelayanan dan memperoleh hak-hak korban.

4) Peranan sebagai advokasi

Peranan sebagai advokasi yaitu membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Peranan ini terlihat ketika pekerja sosial memberikan argumentasi tentang masalah penerima pelayanan, membela kepepinagan dan memberikan pelayanan yang di butuhkan sehingga kebutuhan penerima pelayanan dapat terjamin.

5) Peranan sebagai perunding

Yaitu peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima pelayanan mulai bekerja sama. Kerja sama antara penerima pelayanan dan pekerja sosial yang dimaksud melalui kegiatan bercerita, bertukar informasi maupun pengalaman.

6) Peranan sebagai pelindung

Yaitu melindungi klien atau penerima pelayanan sehingga merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan pekerja sosial. Peranan ini memberikan sebuah ketenangan bagi penerima pelayanan terhadap kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Selain itu dalam praktik pekerjaan sosial sendiri memiliki etika untuk mengharuskan pekerja sosial merahasiakan masalah dari penerima pelayanan.

7) Pelayanan sebagai fasilitasi

Pekerja sosial harus bervariasi dalam memberikan pelayanan tergantung pada kebutuhan korban dan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, pekerja sosial harus pandai melihat masalah maupun kebutuhan yang dihadapi penerima pelayanan sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh penerima pelayanan.

8) Peranan sebagai inisiator

Pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah yang ada dibadan atau lembaga atau panti sosial dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Disinilah peran pekerja sosial untuk menyadarkan badan, lembaga, atau panti sosial bahwa ada permasalahan

yang terjadi dilingkungan sekitar. Peran pekerja sosial ini sangat penting agar memberikan sebuah keadaran pada pihak-pihak terkait pembinaan tentang masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

9) Peranan sebagai negosiator

Ditunjukkan pada penerima pelayanan yang mengalami konflik dan mencari penyelesaiannya sehingga tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan kata lain, negosiator memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari permasalahan pihak yang sedang berkonflik. Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2.2.3. Tujuan Pembinaan

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya rasional dan
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

sedangkan menurut mangkunegara komponen-komponen pembinaan terdiri dari:

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur
2. Para pembina yang profesional
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi prasyarat yang ditentukan. Pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis.

Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

2.2.4. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yang biasanya disebut dengan resos ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupaya memulihkan kondisi fisik, mental dan sosialnya seperti meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar". Pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar sehingga memiliki kemauan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan sosial budaya, serta memulihkan kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial memiliki fungsi-fungsi dalam kegiatan yang dilakukannya.

Fungsi-fungsi tersebut memiliki peranan yang bermanfaat bagi rehabilitasi. Fungsi pokok rehabilitasi sosial, yaitu:

- 1) Pencegahan, yaitu mencegah timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial, mencegah berkembangnya atau meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat serta mencegah timbulnya kembali permasalahan kesejahteraan sosial yang pernah terjadi oleh perseorangan, keluarga, masyarakat.
- 2) Rehabilitasi yaitu sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

- 3) Pengembangan, yaitu fungsi yang mengandung tiga ciri pokok yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, menjalarnya efek ganda dalam lingkungan sosial keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Penunjang yaitu dalam kaitan pembangunan nasional mengandung makna penting sebagai salah satu unsur yang ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu program, baik intra maupun intersektoral.

Fungsi rehabilitasi sosial secara garis besar adalah fungsi tanggap darurat, pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, fungsi penunjang dan pengembangan. Kegiatan rehabilitasi sosial sendiri secara sederhana dapat diartikan memiliki fungsi untuk memberikan tanggapan untuk terhadap permasalahan dan mencegah meluasnya permasalahan tersebut. selain itu rehabilitasi sosial memiliki fungsi memberikan perlindungan berupa kegiatan pelayanan sosial pada penerima pelayanan. Rehabilitasi sosial bukan hanya memberikan tanggapan, mencegah dan melindungi saja melainkan adanya upaya rehabilitasi untuk memulihkan psikis dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar melalui kegiatan pembinaan maupun bimbingan sosial. Kegiatan rehabilitasi juga memiliki fungsi sebagai pengembangan dan penunjang. Fungsi pengembangan dan penunjang ditujukan bukan hanya pada individu penerima pelayanan namu untuk meningkatkan kesejahteraan demi tercapainya pembangunan nasional.

2.3. Anak Jalanan

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan

sebagian besar waktunya dijalan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanantinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat. UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencarinfkah atau berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antra 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Mulandar, memberi pengertian tentang anak jalanan yaitu anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis

pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.

2.3.1. Latar Belakang Munculnya Anak Jalanan

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri. Namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah pertama, kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan. Kedua, kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka. Ketiga, faktor lingkungan terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Adakalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seseorang anak berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah disekolah, menjadi penguat alasan untuk turun di jalan.

2.3.2. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

1. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup.
2. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan.
3. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.
4. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup dijalan.
5. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak yang telah memasuki dunia jalanan menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak lain untuk mengikuti jejaknya.
6. Faktor kehilangan orang tua, banyak anak, banyak anak memasuki dunia karena kedua orangtuanya meninggal atau ditangkap kamtib dan dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu tempat. Akhirnya anak terpaksa hidup sendiri, untuk mempertahankan hidupnya, mereka melakukan kegiatan di jalan.
7. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain.

Selain disebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek yang melatar belakangi munculnya anak jalanan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, yaitu aspek sosial ekonomi. Untuk mengetahui sosial ekonomi keluarga, maka perlu diketahui aspek apa saja yang mendukung, sehingga bisa diketahui suatu kondisi sosial ekonomi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud disini adalah pendidikan, pekerjaan dan pendapatan (ekonomi), juga faktor tradisi.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan pendidikan diharapkan agar setiap masyarakat bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan suatu usaha dari para pendidik untuk memberikan bantuan dalam memberikan arahan terhadap anak didik, sehingga mereka ada perubahan sikap dan wawasan yang lebih bersifat positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum. Pada dasarnya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari individu maupun dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan syarat untuk menjadi manusia berkualitas. Selain itu dengan memiliki pendidikan, masyarakat secara individu bisa meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Seperti halnya dengan nasib anak jalanan secara umum mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Kebanyakan mereka dari pendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah bersekolah, karena anak-anak ini harus bekerja di jalanan.

2. Ekonomi

Kehidupan keluarga yang serba kekurangan mendorong anak untuk turun ke jalan untuk bekerja dan mencari uang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan orang tua dan keluarga. Alasan ekonomi menjadi penyebab utama dari sekian banyak anak jalanan. Terdorong keinginan untuk membantu ekonomi keluarga mereka terpaksa turun ke jalan.

Lebih lanjut, karnaji menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mendorong anak jalanan turun ke jalan yaitu :

- a) Motivasi muncul dari anak itu sendiri untuk membantu ekonomi keluarga
- b) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan
- c) Dipaksa oleh orang tua untuk bekerja

3. Tradisi

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak atau munculnya anak jalanan. Bahwa anak dari kalangan keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang selayaknya bekerja. Sudah menjadi aksioma kultural bagi banyak kalangan terutama dinegara berkembang. Menurut departemen sosial secara umum menyebutkan ada tiga tingkatan

penyebab keberadaan anak jalanan, yaitu:

- a) Tingkat mikro (immediate causes)

Pada tingkat ini, biasanya anak menjadi anak jalanan disebabkan faktor internal dalam keluarga, yaitu:

- 1) Keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak dengan terpaksa lari dari keluarga, berusaha untuk mandiri dan berjuang sendiri mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhannya.
- 2) Orang tua mengalami perceraian, perceraian mengakibatkan kurangnya perhatian, kasih sayang dan rasa aman yang diterima anak oleh keluarga, sehingga anak mencari kebutuhan tersebut dengan cara menjadi anak jalanan.

b) Tingkat meso (underlying causes)

Pada tingkat meso, faktor penyebab dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat atau komunitas miskin mempunyai pola hidup dan budayaiskinya sendiri. Pola hidup yang tidak teratur dan memandang anak sebagai aset untuk menunjang hidup keluarga yang menyebabkan hilangnya kebutuhan-kebutuhan anak sesuai tugas perkembangannya. Sehingga anak kadang harus bekerja dan tidak bersekolah. Tidak ada orientasi masa depan yang menyebabkan mereka dalam kondisi yang rentan dalam berbagai hal.
- 2) Pola urbanisasi kekota-kota besar tanpa perbekalan memadai
- 3) Penolakan masyarakat terhadap anak jalanan sebagai calon kriminal.

c. Tingkat makro (basic causes)

Pada tingkat makro, faktor penyebab dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Ekonomi.

Peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal, mereka harus lama dijalan dengan meninggalkan bangku, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi.

2) Pendidikan

Biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif dan ketentuan-ketentuan teknis birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.

3) Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antar sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai pembuat masalah (trouble maker). Pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan keamanan (security approach).

Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan: Kemiskinan dan Keretakan Keluarga (Broken Home) :

1. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok yang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan sosial, kehidupan moral mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Masalah kemiskinan ini merupakan salah satu pemicu munculnya anak jalanan. Anak yang seharusnya mendapat penghidupan maupun pendidikan yang layak dimasa kanak-kanak, ternyata mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang kuat sebagai salah satu penyebab munculnya anak jalanan. Tingkat ekonomi keluarga yang rendah secara tidak langsung memaksa mereka berpikir atau bertindak untuk mencari jalan keluarnya yaitu sebagai anak jalanan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, muapun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan tiambunya nilai-nilai sosial yng baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. Masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial karena menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk

memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci keiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi, tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila, dan lain sebagainya. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya masalah adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya, misalnya, pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.

2. Keretakan keluarga (broken home)

Kelurga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah:

- a) Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi
- b) Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dengan masing-masing mempunyai sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik.

- c) Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain
- d) Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. Ketidak berfungsi keluarga merupakan salah satu masalah pemicu anak jalanan.

Kelurga dianggap merupakan tempat nyaman menjadi salah satu hal tidak nyaman lagi bai anak. Seringnya terjadi kekerasan dalam suatu keluarga ini menyebabkan anak terjun ke jalanan. Kelurga broken home merupakan situasi keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan-kekerasan, konflik antar orang tua, anak dengan orang tua, kakak dengan adik yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kelurga, perceraian orang tua, sehingga anak harus dititipkan oleh keluarga maupun orang lain, hal ini memicu munculnya anak jalanan. Fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan tidak adanya rasa aman dan nyaman sehingga anak turun ke jalan.

2.3.3. Karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:

1. Chidren of the street

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan

2. Children on the street

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodic.

3. Vulberable children to be street children

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya.

Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: Bagong Suyanto Dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis Dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus :

1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
2. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan Kenek.
3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
4. Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.

Adapun berdasarkan hasil kajian dilapangan secara garis besar anak jalanan

dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Children on the street

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

2. Children Of The Street

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab. Biasanya lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah dan menyimpang baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

3. Children from families of the street

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong-kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. Anak jalanan

melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas atau sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual.

2.3.4. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan

Anak jalanan untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja asongan di kereta api dan bus kota, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, tukang lap mobil.

2.3.5. Isu Prioritas

Masalah prioritas anak jalanan yang mendesak untuk segera ditangani oleh berbagai pihak, ada delapan masalah pokok yang harus di tangani secara baik yaitu :

1. Gaya hidup dan prilaku anak jalanan yang acap kali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti prilaku ngelem,seks bebas kebiasaan berkelahi, dan sebagainya.
2. Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan jam kerja yang acap kali kelewat batas bagi anak-anak yang masih berusia belia.

3. Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai
4. Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang tua yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak secara layak.
5. Adanya bentuk intervensi dan sikap sewenang-wenang dari pihak luar terhadap anak jalanan, baik atas nama hukum maupun karena ulah preman yang mencoba mengambil manfaat dari keberadaan anak jalanan.
6. Adanya keliruan persepsi dan sikap prejudice sebagaimana warga masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan.
7. Adanya sebagian anak jalanan yang tengah menghadapi masalah khusus, baik akibat ulahnya yang terencana, maupun karena ketidaktahuannya terhadap bahaya dari sebuah tindakan tertentu, seperti hamil dalam usia yang terlalu dini akibat seks bebas, perilaku ngelem, dan sebagainya.
8. Mekanisme koordinasi dan sistem kelembagaan penanganan anak jalanan yang belum berkembang secara baik antara pemerintah dengan LSM maupun persoalan internal di antara lembaga itu sendiri.

Anak jalanan pada hakikatnya adalah korban dan fenomena yang timbul efek samping dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang terlalu memusat di berbagai kota besar.

2.4.Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud:

- a. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
- b. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
- c. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.

Dinas sosial adalah kantor pemerintahan daerah dibidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah yang mempunyai fungsi pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat. Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, memiliki program sebagai berikut : pencegahan, usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah perkembangannya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab anak jalanan, usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan yang ditunjukkan baik

kepada seorang maupun kelompok dan usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan melalui sistem panti atau non panti.

2.5. Penelitian yang relevan

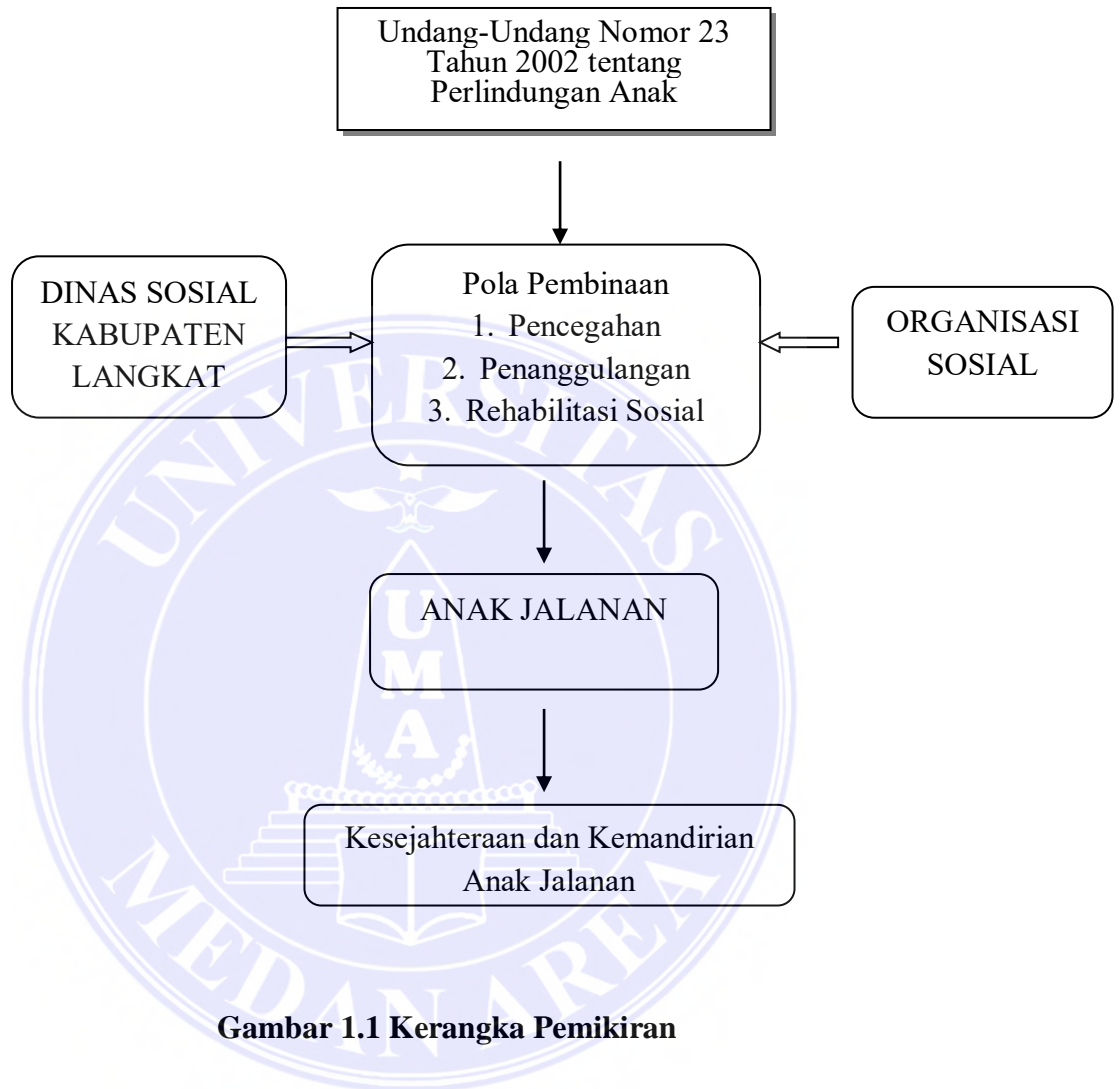
Adapun penelitian yang relevan saya mengutip dari penelitian saudara Sarbani Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul “PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG”

Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan adalah memberikan perlindungan kepada anak jalanan tanpa terkecuali untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.6. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* Sugiyono (2015:19) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan

secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian dari factor-faktor yang ada akan dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi penelitian tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat. Kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada permasalahannya.

Penggunaan metode ini dimulai dari analisis berbagai data yang dihimpun dari penelitian, kemudian bergerak kearah kesimpulan. Tujuan dari metode ini tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran saja tetapi memahami kebenaran tersebut. Penelitian ini mencoba memecahkan masalah yang ada dan mengamati Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peranan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kabupaten Langkat.

3.3. Informan Penelitian

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menyebutkan akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang akan memperkuat analisis peneliti.

Penelitian memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan :

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat (Informan Kunci)
- b. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Langkat (Informan Utama)
- c. Masyarakat atau Anak Jalanan (Informan tambahan).

3.4. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

- a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (1998) observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh oleh observasi. Data ini dikumpulkan dan sering dengan bantuan sebagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat di observasi dengan jelas.

- b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:317) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, wasiat, undang-undang, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada.

3.5. Teknik Analisa Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temui dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun aktivitas dalam analisis data antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion Drawing / Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Langkat yaitu, usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah anak jalanan seperti yang dilakukan Pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan, usaha penanggulangan Dinas Sosial dan satpol PP bekerja sama merazia anak jalanan dengan melakukan razia dua kali dalam seminggu, biasanya anak jalanan berada di lampu merah, dan Usaha Rehabilitas Sosial yang dilakukan Dinas Sosial dan satpol PP untuk merajia anak jalanan, di nasehatin, dan di panggil orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak mampu mendidik atau membina anak tersebut, maka anak akan dimasukkan ke panti asuhan Alwasliyah Jl. Lalang, Tanjungpura”.
2. Faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam pembinaan anak jalanan yaitu : belum adanya panti asuhan yang dimiliki oleh pemerintah, panti asuhannya masih bekerja sama dengan pihak swasta dan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi anak jalanan.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pola pembinaan Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalanan Kabupaten Langkat adalah berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya meningkatkan jumlah anggaran terhadap Dinas Sosial dalam program pembinaan anak jalanan seperti anggaran yang digunakan untuk sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam penanggulangan anak jalanan bisa berjalan secara optimal.
2. Pemerintah seharusnya memiliki panti rehabilitasi sendiri agar Dinas Sosial dapat turut serta dalam pelaksanaan pembinaan. Pemerintah juga hendaknya membuat program pembinaan lanjutan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan lanjutan ini sangat penting, karena disamping anak jalanan termonitoring kegiatannya juga dapat diketahui keberhasilan dari program rehabilitasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifudin. *Pengantar AdminitrasiPembangunan*, Alfabeta. Bandung. 2001.
- Afyanti, Yati. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 1989.
- Dahlan, Hanafi, *Dinamika Anak Terlantar*. Yogyakarta: 2008.
- Enni. Hardiati dkk. *Evaluasi Model Pelayanan Sosial Anak Terlantar didalam Panti*. Yogyakarta: 2010.
- Hayat. *Manajemen pelayanan publik*, Jakarta
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*. Nuasa, Bandung: 2010.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. 2015
- Novrizal, Muhammad, *Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak dalam Penanganan Anak Jalanan*. Semarang : 2009
- Sandiaja, Bernadus. *Pengantar Membangun Teori Penelitian*, Jakarta : 2015
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta : 2013
- Sugiyono, *Objek Penelitian*, Bandung : 2015
- Sunarto, Kumanto. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supartono, *Bacaan DasarPendamping Anak Jalanan*, Yayasan Setara Semarang: 2004
- Siagian, Sondang. 1990. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Jurnal dan Skripsi

- Ramadhani, Sarbaini 2016, “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*”, Jurnal Ilmiah Universitas Lambung Mangkurat.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat

Peraturan Bupati Langkat Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat



LAMPIRAN



Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala seksi rehabilitasi sosial

